



**PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG**



**RENJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat serta karuniaNYA kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak, yang nantinya akan berguna dan membantu Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggara pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal. Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Tanjungpinang, Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang



SAMSUDI, S.Sos., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19720906 199403 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan

awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA Perubahan OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
- 4) Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedofikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.
- 16) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 17) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.
- 18) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Sebagai pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
- 2) Menjadi alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

- 3) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.
- 4) Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- 5) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa and Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi adalah untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tenis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 254.432.670,- dan realisasi sebesar Rp. 154.327.512,- atau tidak terserap sebesar 39,34%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Bantuan hibah barang untuk ormas dengan capaian indikator kinerja sebesar 63,64%; 2) Jumlah anggota masyarakat yang mendapat Pendidikan dengan capaian indikator kinerja sebesar 50%; dan 3) Jumlah ormas yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara dengan capaian indikator sebesar 0%. Faktor penghambat atas tidak

tercapainya target kinerja diatas dikarenakan kurangnya anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 282.174.500,- dan realisasi sebesar Rp. 161.770.170,- atau tidak terserap sebesar 42,67%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah ormas yang dibina dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%; dan 2) Jumlah ormas yang menerima hibah uang dengan capaian indikator kinerja sebesar 80%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada ormas yang tidak bersedia menerima hibah uang.

B. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 387.761.650,- dan realisasi sebesar Rp. 339,424.550,- atau tidak terserap sebesar 12,47%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah koordinasi LAM yang difasilitasi dalam bentuk pertemuan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%; dan 2) Tersedianya honorarium LAM Kota Tanjungpinang dengan capaian indikator kinerja sebesar 50%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan kepengurusan LAM dan jumlah pengurus yang baru lebih banyak dari pengurus sebelumnya sehingga tidak tersedia anggaran honorarium untuk 12 bulan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.936.300,- dan realisasi sebesar Rp. 12.448.315,- atau terserap sebesar 96,23%. Adapun indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD dengan capaian indikator kinerja 1 dokumen (100%). Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan OPD. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : rapat dan arahan yang berkesinambungan dilaksanakan, koordinasi dengan bidang-bidang terkait, serta tim bekerja secara optimal.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.272.222.635,- dan realisasi sebesar Rp. 4.089.240.409,- atau terserap sebesar 95,72%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%); dan 2) Tersedianya tambahan penghasilan ASN dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%). Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya pembayaran gaji ASN dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau terserap sebesar 100%. Indikator kinerja adalah

terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.430.100,- dan realisasi sebesar Rp. 43.290.910,- atau terserap sebesar 93,24%. Indikator kinerja adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.120.156,- dan realisasi sebesar Rp. 16.040.055,- atau terserap sebesar 99,50%. Indikator kinerja adalah tersedianya peralatan rumah tangga dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.553.600,- dan realisasi sebesar Rp. 43.660.000,- atau terserap sebesar 97,99%. Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan bahan logistic dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.354.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.493.822,- atau terserap sebesar 95,10%. Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.360.000,- atau terserap sebesar 53,60%. Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).
- g. Penyediaan Bahan/Material dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.246.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.148.390,- atau terserap sebesar 99,43%. Indikator kinerja adalah tersedianya kebutuhan bahan/material dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 301.447.120,- dan realisasi sebesar Rp. 209.785.679,- atau terserap sebesar 69,59%. Indikator kinerja adalah tersedianya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp.236.151.400,- dan realisasi sebesar Rp. 233.216.738,- atau terserap sebesar 98,76%. Indikator kinerja adalah 1) Tersedianya partisi ruangan dengan capaian indikator kinerja 2 unit (100%); dan 2) Tersedianya kursi kerja dengan capaian indikator kinerja 27 unit (100%).

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 240.736.100,- dan realisasi sebesar Rp. 235.423.250,- atau terserap sebesar 97,79%. Indikator kinerja adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya dengan capaian indikator kinerja 18 unit (100%).

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.240.000,- dan realisasi sebesar Rp. 61.120.000,- atau terserap sebesar 92,27%. Indikator kinerja adalah tersedianya terbayarnya tagihan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 248.840.180,- dan realisasi sebesar Rp. 240.840.096,- atau terserap sebesar 100,00%. Indikator kinerja adalah terbayarnya jasa pelayanan umum kantor dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 123.330.000,- dan realisasi sebesar Rp. 84.330.970,- atau terserap sebesar 68,38%. Indikator kinerja adalah terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.460.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14.973.900,- atau terserap sebesar 85,76%. Indikator kinerja adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51.038.570,- dan realisasi sebesar Rp. 44.085.077,- atau terserap sebesar 86,38%. Indikator kinerja adalah jumlah koordinasi yang dilakukan internal maupun eksternal dengan capaian indikator kinerja 4 kali rapat koordinasi (100%).

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 201.869.970,- dan realisasi sebesar Rp. 198.912.550,- atau terserap sebesar 98,53%. Indikator kinerja adalah jumlah koordinasi/rapat yang dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja 4 kali rapat (100%).

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.278.104.246,- dan realisasi sebesar Rp. 1.273.737.726,- atau terserap sebesar 99,66%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah partai politik mendapat bantuan keuangan dengan capaian indikator kinerja 10 partai politik (100%); dan 2) Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan wawasan dengan capaian indikator kinerja 20 orang (100%).

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 191.033.158,- dan realisasi sebesar Rp. 189.132.051,- atau terserap sebesar 99%. Indikator kinerja adalah jumlah laporan pemantauan perkembangan politik di daerah dengan capaian indikator kinerja 12 laporan (100%).

D. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 130.085.700,- dan realisasi sebesar Rp. 118.201.802,- atau terserap sebesar 90,86%. Indikator kinerja adalah Jumlah tokoh dan pemuda yang terlibat dalam dialog lintas agama dengan capaian indikator kinerja 50 orang (100%).

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 167.186.740,- dan realisasi sebesar Rp. 156.062.611,- atau terserap sebesar 93,35%. Indikator kinerja adalah jumlah koordinasi FKUB yang difasilitasi. Hasil kegiatan ini adalah 1) Jumlah koordinasi/rapat yang dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja 2 kali rapat (100%); dan 2) Tersedianya Honorarium FKUB Kota Tanjungpinang dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).

E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.855.216,- dan realisasi sebesar Rp. 13.273.100,- atau terserap sebesar 95,80%. Indikator kinerja adalah jumlah rapat koordinasi penanganan konflik sosial dengan capaian indikator kinerja 4 kali rapat (100%)

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta

Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 146.461.260,- dan realisasi sebesar Rp. 143.079.940,- atau terserap sebesar 97,69%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah rapat koordinasi, dialog dengan masyarakat 4 kecamatan dengan capaian indikator kinerja 4 kali rapat/dialog (100%); dan 2) Tersedianya Honorarium FKDM Kota Tanjungpinang dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).

- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 157.720.100,- dan realisasi sebesar Rp. 153.753.309,- atau terserap sebesar 97,48%. Indikator kinerja adalah 1) jumlah laporan hasil koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dengan capaian indikator kinerja 12 laporan (100%); dan 2) Tersedianya Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%).

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Seluruh program/kegiatan tidak ada yang melebihi target, karena semuanya sesuai dengan rencana target yang telah ditentukan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 (SEMESTER II)
OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2022 yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)							
				Satuan Indikator	RKPD	APBD	Satuan Indikator	RKPD Perubahan	APBD Perubahan	I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14		15 = 11 + 12 + 13 + 14		16 = 15 / 10 * 100						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				14.720.276.861		7.677.540.348				8.467.276.829		8.976.791.371		747.207.822		1.811.048.598		2.860.374.113		2.900.502.949		8.319.133.482	91,45	92,67
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				14.720.276.861		7.677.540.348				8.467.276.829		8.976.791.371		747.207.822		1.811.048.598		2.860.374.113		2.900.502.949		8.319.133.482	91,45	92,67
	8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				14.720.276.861		7.677.540.348				8.467.276.829		8.976.791.371		747.207.822		1.811.048.598		2.860.374.113		2.900.502.949		8.319.133.482	91,45	92,67
	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.891.427.298		4.633.598.218				5.423.334.699		5.715.067.591		670.903.484		1.676.796.442		1.277.515.124		1.748.157.484		5.373.372.534	100,00	94,02
	801012,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		12.936.300				12.936.300		12.936.300		700.000		300.000		900.000		10.548.315		12.448.315		
	801012,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan OPD	Dokumen	1	35.000.000	2	12.936.300	Dokumen	1	12.936.300	2	12.936.300	1	700.000	0	300.000	0	900.000	1	10.548.315	2	12.448.315	100,00	96,23	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					100,00	96,23				
Predikat Kinerja Kegiatan																					ST	ST				
	801012,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.600.000.000		3.294.898.738				4.084.635.219		4.272.222.635		534.719.276		1.417.714.273		975.197.979		1.161.608.881		4.089.240.409		
	801012,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	3.600.000.000	14	3.294.898.738	Bulan	12	4.084.635.219	14	4.272.222.635	3	534.719.276	4	1.417.714.273	4	975.197.979	3	1.161.608.881	14	4.089.240.409	100,00	95,72	
			Tersedianya tambahan penghasilan ASN	Bulan	12				Bulan	12				1		6			2		5			100,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					100,00	95,72				
Predikat Kinerja Kegiatan																					ST	ST				

	801012,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			988.127.730		397.342.000			397.342.000		497.150.976		39.899.192		41.329.045		71.657.046		240.893.573		393.778.856			
	801012,0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	100.000.000	12	3.000.000	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	3	0	3	0	3	0	3	3.000.000	12	3.000.000	100,00	100,00
	801012,0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	127.000.000	12	36.424.180	Bulan	12	36.424.180	12	46.430.100	3	4.321.500	3	0	3	20.152.218	3	18.817.192	12	43.290.910	100,00	93,24
	801012,0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	56.043.570	12	14.518.876	Bulan	12	14.518.876	12	16.120.156	3	0	3	8.964.915	3	3.722.940	3	3.352.200	12	16.040.055	100,00	99,50
	801012,0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhiya kebutuhan bahan logistik	Bulan	12	70.000.000	12	35.913.744	Bulan	12	35.913.744	12	44.553.600	3	5.600.000	3	8.155.000	3	12.355.000	3	17.550.000	12	43.660.000	100,00	97,99
	801012,0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	80.093.860	12	52.468.200	Bulan	12	52.468.200	12	58.354.000	3	2.760.000	3	3.619.000	3	5.664.400	3	43.450.422	12	55.493.822	100,00	95,10
	801012,0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	33.000.000	12	10.000.000	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	3	240.000	3	2.600.000	3	760.000	3	1.760.000	12	5.360.000	100,00	53,60
	801012,0607	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya kebutuhan bahan/material	Bulan	12	41.990.300	12	10.797.000	Bulan	12	10.797.000	12	17.246.000	3	0	3	0	3	0	3	17.148.390	12	17.148.390	100,00	99,43
	801012,0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	480.000.000	12	234.220.000	Bulan	12	234.220.000	12	301.447.120	3	26.977.692	3	17.990.130	3	29.002.488	3	135.815.369	12	209.785.679	100,00	69,59
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	79,21		
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	T		
	801012,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			631.491.400		476.887.500			476.887.500		476.887.500		45.650.000		117.943.050		107.784.385		197.262.553		468.639.988			
	801012,0705	Pengadaan Mebel	Tersedianya Partisi Ruangan	unit	2	236.151.400	2	236.151.400	unit	2	236.151.400	2	236.151.400	0	0	63.469.800	1	107.784.385	1	61.962.553	2	233.216.738	100,00	98,76	
			Tersedianya Kursi Kerja	unit	27		27	27	unit	27	27	27	27	0			27		0		0		0		0
	801012,0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	unit	18	395.340.000	18	240.736.100	unit	18	240.736.100	17	240.736.100	9	45.650.000	4	54.473.250	0	0	4	135.300.000	17	235.423.250	100,00	97,79
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	98,27		
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST		

	801012,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				412.738.568		312.743.680		312.743.680		315.080.180		49.935.016		82.852.524		74.102.524		103.070.032		309.960.096			
	801012,0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	105.864.000	12	64.040.000	Bulan	12	64.040.000	12	66.240.000	3	9.920.000	3	14.080.000	3	14.080.000	3	23.040.000	12	61.120.000	100,00	92,27
	801012,0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	306.874.568	12	248.703.680	Bulan	12	248.703.680	12	248.840.180	3	40.015.016	3	68.772.524	3	60.022.524	3	80.030.032	12	248.840.096	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	98,37		
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST		
	801012,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.069.600		138.790.000		138.790.000		140.790.000		-		16.657.550		47.873.190		34.774.130		99.304.870			
	801012,0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Bulan	12	183.000.000	12	121.330.000	Bulan	12	121.330.000	12	123.330.000	3	0	3	11.285.150	3	47.873.190	3	25.172.630	12	84.330.970	100,00	68,38
	801012,0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	41.069.600	12	17.460.000	Bulan	12	17.460.000	12	17.460.000	3	0	3	5.372.400	3	0	3	9.601.500	12	14.973.900	100,00	85,76
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	70,53		
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	S		
	8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				445.620.152		220.928.740		220.928.740		252.908.540		-		56.741.800		93.249.000		93.006.827		242.997.627	100,00	96,08	
	801022,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				445.620.152		220.928.740		220.928.740		252.908.540		-		56.741.800		93.249.000		93.006.827		242.997.627			

801022,0104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi yang dilakukan internal maupun eksternal	rapat koordinasi	4	195.620.152	4	27.127.770	rapat koordinasi	4	27.127.770	4	51.038.570	1	0	1	5.762.950	1	7.822.000	1	30.500.127	4	44.085.077	100,00	86,38
801022,0105	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi/rapat yang dilaksanakan	kali rapat	4	250.000.000	4	193.800.970	kali rapat	4	193.800.970	4	201.869.970	1	0	1	50.978.850	1	85.427.000	1	62.506.700	4	198.912.550	100,00	98,53
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						100,00	96,08	
Predikat Kinerja Kegiatan																						ST	ST	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				3.236.878.414		1.319.137.904			1.319.137.904		1.469.137.404		-		9.677.100		1.274.721.197		178.471.480		1.462.869.777	100,00	99,57
801032,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta				3.236.878.414		1.319.137.904			1.319.137.904		1.469.137.404		-		9.677.100		1.274.721.197		178.471.480		1.462.869.777		

		Pemantauan Situasi Politik																								
	801032,01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan	Partai politik	10		10		Partai politik	10	10		0	0	10		0		10		100,00					
			Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan wawasan	Orang	20	3.017.812.704	20	1.278.104.246	Orang	20	20	1.278.104.246	1.278.104.246	0	20	3.877.100	1.260.086.946	0	9.773.680	20	1.273.737.726	100,00	99,66			
	801032,01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik di daerah	laporan	12	219.065.710	12	41.033.658	laporan	12	12	41.033.658	12	191.033.158	3	0	3	5.800.000	3	14.634.251	3	168.697.800	12	189.132.051	100,00	99,00
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					100,00	99,57				
Predikat Kinerja Kegiatan																					ST	ST				
	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				3.243.887.204		606.622.170				606.622.170		536.607.170	-		1.549.000		6.136.150		308.413.072		316.098.222	58,73	58,91	
	801042,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan				3.243.887.204		606.622.170				606.622.170		536.607.170	-		1.549.000		6.136.150		308.413.072		316.098.222			

		Organisasi Kemasyarakatan																					
	801042,0102	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bantuan hibah barang untuk ormas	Ormas	11	11		Ormas	11	11	0	0	0	7	7						63,64		
			Jumlah anggota organisasi kemasyarakatan yang mendapat pendidikan	Orang	200	200	324.432.670	Orang	200	200	254.432.670	0	0	1.549.000	0	4.085.000	100	148.693.512	100	154.327.512	50,00	60,66	
			Jumlah ormas yang mendapat pendidikan Bela Negara	Ormas	50	50		Ormas	50	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	801042,0103	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang dibina	ormas	20	20		ormas	20	20	0	0	0	20	20						100,00		
			Jumlah Ormas yang menerima uang hibah	ormas	5	100	1.846.995.420	ormas	5	5	282.174.500	0	0	0	0	2.051.150	4	159.719.560	4	161.770.710	80,00	57,33	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																					58,73	58,91	
Predikat Kinerja Kegiatan																					R	R	
	80105	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				841.437.115	579.088.740		579.088.740	685.034.090	900.000	53.335.756	72.928.531	486.524.686	613.688.973	90,00	89,59						
	801052,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				841.437.115	579.088.740		579.088.740	685.034.090	900.000	53.335.756	72.928.531	486.524.686	613.688.973								

	801052,01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah tokoh dan pemuda yang terlibat dalam dialog lintas agama	orang	50	320.000.000	50	29.136.000	orang	50	29.136.000	50	130.085.70 0	5 0	0	0	12.675.056	0	0	0	105.526.75 6	50	118.201.81 2	100,0 0	90,86
	801052,01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi/rapat yang dilaksanakan	kali rapat	2		2		kali rapat	2	2		1		0		0		1		2		100,0 0		
			Tersedianya Honorarium FKUB Kota Tanjungpinang	Bulan	12	206.437.115	12	157.690.74 0	Bulan	12	12		3	900.000	3	38.604.700	3	69.395.931	3	3	47.161.980	12	156.062.61 1	100,0 0	93,35
	801052,01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi LAM yang difasilitasi dalam bentuk pertemuan	orang	10 0	315.000.000	10 0	392.262.00 0	orang	10 0	10 0		0		0	0	2.056.000		10 0		333.835.95 0	10 0	339.424.55 0	100,0 0	87,53
			Tersedianya Honorarium LAM Kota Tanjungpinang	Bulan	12		12		Bulan	12	12		0		0			0	6		6		50,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																						90,00	89,59		
Predikat Kinerja Kegiatan																						T	T		
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.061.026.6 78		318.164.57 6			318.164.57 6		318.036.57 6	75.404.33 8		12.948.500		135.824.11 1		85.929.400		310.106.34 9	100,0 0	97,51	

	801062,01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1.061.026.678		318.164.576			318.164.576		318.036.576		75.404.338		12.948.500		135.824.111		85.929.400		310.106.349				
	801062,0103	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	rapat	4	187.089.378	4	13.943.216	rapat	4	13.943.216	4	13.855.216	0	0	0	4.453.500	4	2.665.200	0	6.154.400	4	13.273.100	100,00	95,80		
	801062,0104	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat koordinasi, dialog dengan masyarakat 4 kecamatan	rapat/dialog	4		4		rapat/dialog	4		4		2		1		1		0		4	100,00				
			Tersedianya Honorarium FKDM Kota Tanjungpinang	Bulan	12	399.185.720	12	146.499.260	Bulan	12	146.499.260	12	146.461.260	3	34.896.400		8.095.000	3	64.256.040	3	35.832.500	12	143.079.940	100,00	97,69		
	801062,0105	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah laporan hasil koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang	laporan	12	474.751.580	12	157.722.100	laporan	12	157.722.100	12	157.720.100	3	40.507.938		400.000	3	68.902.871	3	43.942.500	12	153.753.309	100,00	97,48		
			Tersedianya Honorarium Tim	Bulan	12		12	0	Bulan	12		12	0	3				6		3		12	100,00				

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- Kepala Badan;
- Sekretariat, terdiri atas;
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Pemberian dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d) Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

	berkonflik)	partai dan Ormas yang terdaftar dikali 100													
6	Persentase Keikutsertaan partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang aman dan damai	Jumlah anggota Partai Politik dan ORMAS yang aktif berdemokrasi dibagi jumlah anggota partai politik dan ORMAS yang ada di kali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Konflik pemilu tertangani	Jumlah Potensi konflik pemilu tertangani di bagi dengan jumlah Potensi Konflik di kali 100	%	100	100	0	0	100	100	-	-	100	100	-	-
8	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)	Jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) dikali 100	%												
		- Pileg	%	70				72,97				104,24			
		- Pilpres	%	65				73,35				112,85			
		- Pilgub	%		60			62,15				103,58			
9	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	Jumlah realisasi keuangan perangkat daerah dibagi realisasi keuangan perangkat daerah dikali 100	%	96,20	92,80	96,40	97,56	77,71	95,53	96,40	92,67	80,78	102,94	100	94,99
10	Persentase kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung	Jumlah kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung di bagi jumlah yang tersedia tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur di bagi jumlah yang tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	88,57	100	100	100	88,57	100
12	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan tersusun tepat waktu di bagi Jumlah laporan Keuangan yang harus tersusun di kali	%	91	92	93	94	100	100	100	100	109,89	108,70	107,53	106,38

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

A. Isu-isu Penting terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

1. Pengaruh dari informasi media sosial yang salah akan mengakibatkan pengaruh dan dampak yang jelek dimasyarakat dan informasi tersebut bersifat hoax, yang informasinya tidak mempunyai kebenaran yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Keanekaragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama serta adat istiadat yang berbeda dapat menimbulkan konflik dan pertikaian dilingkungan masyarakat.
3. Rawannya kondisi Kota Tanjungpinang yang dipengaruhi letak geografis sebagai daerah transit yang berdekatan dengan negara tetangga yang akan mengakibatkan masuknya pengaruh-pengaruh asing yang bersifat negative bagi daerah maupun seluruh kedaulatan NKRI.

B. Isu-isu Penting terkait Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Belum optimalnya penyaluran dana hibah Ormas
2. Belum optimalnya kebijakan perwako terkait petunjuk pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Dianggap penting untuk membangun jaringan aplikasi yang berbasis peningkatan pelayanan pendaftaran serta informasi terhadap ormas
4. Pentingnya membangun hubungan kemitraan antara pemerintah Kota Tanjungpinang kepada seluruh ormas yang berada pada wilayah administrasi pemerintah Kota Tanjungpinang
5. Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat

6. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita dalam Pemilu.
7. Dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum

C. Isu-isu Penting terkait Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

1. Dianggap perlu untuk memberikan pelatihan kepada Pengurus FKUB untuk mewujudkan kerukunan antar agama sesuai aturan yang ada
2. Sosialisasi bahaya narkoba kepada pelajar dan masyarakat se-Kota Tanjungpinang
3. Pelaksanaan test urine bagi ASN dan masyarakat
4. Dialog tokoh agama dan masyarakat dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama
5. Pemetaan rumah ibadah di Kota Tanjungpinang
6. Pembuatan peraturan daerah P4GN Kota Tanjungpinang

D. Isu-isu Penting terkait Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Dianggap perlu untuk memberikan pelatihan kepada Tim FKDM dalam memberikan dan mengumpulkan data yang akurat untuk disamakan kepada Pemerintah
2. Pentingnya untuk menerbitkan SK Walikota dan pembuatan rencana Perwako tentang FKDM agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Permasalahan terkait Kesekretariatan

1. Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan
2. belum optimalnya inventarisasi ketatausahaan dan kepegawaian
3. belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah
4. belum optimalnya penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Unit (RKPBU)

5. belum optimalnya kebijakan penyusunan dokumen berita acara pemeriksaan, pinjam pakai, penerimaan, penolakan dan pengeluaran barang-barang inventaris
6. belum optimalnya kegiatan inventarisasi asset sekretariat daerah sesuai KIB.
7. Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan
8. Belum optimalnya pengelolaan program anggaran dan keuangan dikarenakan adanya pergantian sistem ke SIPD
9. Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan dikarenakan tidak ditunjang oleh sistem yang ada/berlaku

2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

TAHUN 2024

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp37.587.326.867	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp37.587.326.867	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				Rp37.587.326.867	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				Rp37.587.326.867	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp37.587.326.867	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Rp37.587.326.867	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72 Skor	Rp8.059.272.067	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72 Skor	Rp8.059.272.067	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp413.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp413.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp16.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp16.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp75.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp75.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp75.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp150.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp22.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp22.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	94%	Rp4.635.833.767	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	94%	Rp4.635.833.767	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	Rp4.485.833.767	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	Rp4.485.833.767	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Rp100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Rp100.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tersedianya dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Rp50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tersedianya dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Rp50.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp50.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Rp26.460.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Rp26.460.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42 Paket	Rp13.230.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42 Paket	Rp13.230.000	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Rp13.230.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Rp13.230.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Rp1.181.623.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Rp1.181.623.300	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp50.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp200.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp44.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp44.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp77.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp77.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp77.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp77.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp33.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp33.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp18.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp18.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp532.623.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp532.623.300	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp50.000.000	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp100.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Rp1.050.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	Rp1.050.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp400.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp400.000.000	
Pengadaan Mebel	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	Rp250.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	Rp250.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Rp250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Rp250.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp100.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	100 %	Rp441.355.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	100 %	Rp441.355.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp71.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp71.500.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp75.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp75.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Rp294.855.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tanjung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Rp294.855.000	

	pinang	yang Disediakan				pinang	yang Disediakan			
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	6%	Rp261.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	6%	Rp261.000.000	
	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Rp77.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Rp77.000.000	
	Kota Tanjungpinang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Rp4.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Tanjungpinang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Rp4.000.000	
	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Rp55.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Rp55.000.000	
	Kota Tanjungpinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp50.000.000	
	Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp50.000.000	
	Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp25.000.000	
2		1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa	100 % 20 %	Rp6.251.000.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa	100 % 20 %	Rp6.251.000.000	

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	2 Dokumen	Rp6.251.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	2 Dokumen	Rp6.251.000.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	Rp250.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	Rp250.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	Rp350.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	Rp350.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	274 Orang	Rp467.500.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	274 Orang	Rp467.500.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41 Orang	Rp2.800.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41 Orang	Rp2.800.000.000	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	Rp225.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	Rp225.000.000	

	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Tanjungpinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	165 Keluarga	Rp258.500.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Tanjungpinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	165 Keluarga	Rp258.500.000	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	Rp175.000.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	Rp175.000.000	
	Pembentukan Paskibraka	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paskibraka	30 Orang	Rp1.200.000.000	Pembentukan Paskibraka	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paskibraka	30 Orang	Rp1.200.000.000	
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	Rp175.000.000	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	Rp175.000.000	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	Rp175.000.000	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	Rp175.000.000	
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	27 Orang	Rp175.000.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Tanjungpinang	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	27 Orang	Rp175.000.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	Rp16.831.554.800	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	Rp16.831.554.800	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35 Orang	Rp14.200.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35 Orang	Rp14.200.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	Rp381.554.800	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	Rp381.554.800	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	21%	Rp600.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	21%	Rp600.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3 Dokumen	Rp600.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3 Dokumen	Rp600.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Rp100.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Rp100.000.000	

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Rp100.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Rp100.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	Rp150.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	Rp150.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	Rp150.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	Rp150.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	Rp100.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	Rp100.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama 2. Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	80 % 5 %	Rp1.347.200.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama 2. Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	80 % 5 %	Rp1.347.200.000	

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2 Dokumen	Rp1.347.200.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2 Dokumen	Rp1.347.200.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Rp150.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Rp150.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Rp150.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Rp150.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	243 Orang	Rp651.200.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	243 Orang	Rp651.200.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	151 Orang	Rp357.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	151 Orang	Rp357.500.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	4 Laporan	Rp38.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	4 Laporan	Rp38.500.000	

	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100 %	Rp4.498.300.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100 %	Rp4.498.300.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Dokumen	Rp4.498.300.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Dokumen	Rp4.498.300.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Rp0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	Rp0	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Rp50.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Rp50.000.000	

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	Rp319.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	Rp319.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	414 Orang	Rp362.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	414 Orang	Rp362.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Laporan	Rp267.300.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Laporan	Rp267.300.000	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rp3.500.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rp3.500.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru, dalam hal penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026 tidak memuat visi maupun misi dari kepala daerah, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 didasarkan pada penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tanjungpinang tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian indikator RPJMD tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, serta regulasi yang berlaku, yang selanjutnya menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
 - b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan;
 - c. Meningkatnya Pembangunan Gender; dan
 - d. Terwujudnya Ketahanan Pangan.
2. Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
 - b. Terkendalinya Laju Inflasi;
 - c. Menurunnya Tingkat Pengangguran; dan
 - d. Menurunnya Angka Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan; dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;
 - b. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah; dan
 - c. Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
4. Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif), dengan sasaran :
- a. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - b. Meningkatnya Daya Saing Daerah.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Tanjungpinang mendukung Tujuan yang ke 4 yaitu “Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif) dengan Sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

“Meningkatkan Kondusifitas Wilayah untuk Menunjang Kinerja Pembangunan Kota Tanjungpinang.”

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah sebagai berikut :

“Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Menjaga Toleransi Kerukunan dan Kerjasama Antar Umat Beragama, Ketahanan Sosial, Pendidikan Politik Masyarakat, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Nasional di Daerah.”

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
			2024	2025	2026
1	Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang	Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik	96	97	98
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	65	-	-
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi	100	100	100

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan capaian organisasi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material
- 1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Pengadaan Mebel
 - 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2 Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan :
 - 2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan :
 - 2.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 2.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 2.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 2.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 2.1.5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - 2.1.6 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 - 2.1.7 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
 - 2.1.8 Pembentukan Paskibraka
 - 2.1.9 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
 - 2.1.10 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
 - 2.1.11 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan :
 - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan :

- 3.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 3.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 3.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 3.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 3.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan :

- 4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :
 - 4.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- 4.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :
 - 5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :
 - 5.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan :

6.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :

6.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

6.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

6.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

6.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

6.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

6.1.6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										12.459.272.067,00			
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										12.459.272.067,00			
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										12.459.272.067,00		
8	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8.059.272.067,00	
8	01	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										431.699.397,00
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	2 Dokumen	100 %	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.800.000,00	
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1.00 Dokumen	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	76.799.397,00	

8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	2 Dokumen	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	78.750.000,00
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Dokumen	100 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	78.750.000,00
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Laporan	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	157.500.000,00

8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	12 Laporan	100 %	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	23.100.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.635.833.767,00				4.867.625.455,00	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	360 Orang/bulan	94 %	4.485.833.767,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	4.710.125.455,00
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Laporan	94 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	52.500.000,00

8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	2 Laporan	94 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	105.000.000,00
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								50.000.000,00				52.500.000,00
8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	52.500.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								26.460.000,00				27.720.000,00
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	42 Paket	100 %	13.230.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	13.860.000,00
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	4 Orang	100 %	13.230.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	4 Orang	13.860.000,00

8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	2 Paket	100 %	77.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	80.850.000,00
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	12 Dokumen	100 %	33.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	34.650.000,00
8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Paket	100 %	18.000.000,00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	18.900.000,00
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	12 Laporan	100 %	532.623.300,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	559.254.465,00
8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Dokumen	100 %	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	52.500.000,00

8	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1.00 Dokumen	100 %	100.000.000,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00 Dokumen	0,00
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.050.000.000,00				775.000.000,00
8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1.00 Unit	100 %	400.000.000,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.00 Unit	100.000.000,00
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	29 Unit	100 %	250.000.000,00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	262.500.000,00
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	18 Unit	100 %	250.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	262.500.000,00
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	5 Unit	100 %	100.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	100.000.000,00

							Disediakan								Disediakan		
8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	100 %	50.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							441.355.000,00				463.422.750,00	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	12 Laporan	100 %	71.500.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.075.000,00
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	12 Laporan	100 %	75.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	78.750.000,00
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	12 Laporan	100 %	294.855.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	309.597.750,00

							Disediakan	daerah							Disediakan		
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								261.000.000,00				265.600.000,00
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	8 Unit	6 %	77.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	80.850.000,00
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	6 %	4.000.000,00		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	7.000.000,00
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	26 Unit	6 %	55.000.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	57.750.000,00
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	6 %	50.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	50.000.000,00

8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	6 %	50.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	50.000.000,00
8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Skor	1 Unit	6 %	25.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	20.000.000,00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							6.251.000.000,00				1.150.000.000,00	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							6.251.000.000,00				1.150.000.000,00	
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	0,00

8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	2.00 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2.00 Dokumen	0,00
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	274.00 Orang	2 Dokumen	467.500.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	274.00 Orang	105.000.000,00

8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	41 Orang	2 Dokumen	2.800.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41 Orang	940.000.000,00
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	2.00 Laporan	2 Dokumen	225.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.00 Laporan	31.500.000,00

8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	165.00 Keluarga	2 Dokumen	258.500.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	165.00 Keluarga	73.500.000,00
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	1 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	0,00

						bangsa											
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Jumlah Paskibraka	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	30 Orang	2 Dokumen	1.200.000.000,00		Jumlah Paskibraka	30 Orang	0,00
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	1 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0,00

						dan karakter bangsa											
8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	1 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0,00
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 20 %	27 Orang	2 Dokumen	175.000.000,00		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	27 Orang	0,00

						dan karakter bangsa										
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							16.831.554.800,00			2.400.000.000,00	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							16.831.554.800,00			2.400.000.000,00	
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Budaya Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1.00 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.00 Dokumen	0,00

							yang Disusun								di Daerah yang Disusun		
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4.00 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4.00 Dokumen	0,00

8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	90.00 Orang	3 Dokumen	2.000.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	90.00 Orang	1.700.000.000,00
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	35.00 Orang	3 Dokumen	14.200.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	35.00 Orang	300.000.000,00

					serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12.00 Laporan	3 Dokumen	381.554.800,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12.00 Laporan	400.000.000,00
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								600.000.000,00			330.000.000,00
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								600.000.000,00			330.000.000,00
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas,	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan,	21 %	2.00 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang	2.00 Dokumen	0,00

					Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kemasyarakatan	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Semua Kel/Desa						Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 %	2.00 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2.00 Dokumen	50.000.000,00
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 %	50.00 Orang	3 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	50.00 Orang	180.000.000,00

					Daerah		Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 %	50.00 Orang	3 Dokumen	150.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.00 Orang	100.000.000,00
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 %	2.00 Laporan	3 Dokumen	100.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	2.00 Laporan	0,00

					Daerah		Ormas dan Ormas Asing di Daerah							Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							1.347.200.000,00						220.000.000,00	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							1.347.200.000,00							220.000.000,00
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kel/Desa	80 % 5 %	2.00 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2.00 Dokumen		0,00	
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua	80 % 5 %	2.00 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	2.00 Dokumen		40.000.000,00	

					Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kel/Desa						Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 % 5 %	243.00 Orang	2 Dokumen	651.200.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	243.00 Orang	30.000.000,00

8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 % 5 %	151.00 Orang	2 Dokumen	357.500.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	151.00 Orang	130.000.000,00
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 % 5 %	4.00 Laporan	2 Dokumen	38.500.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	4.00 Laporan	20.000.000,00

							Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun								Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1.00 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1.00 Dokumen	50.000.000,00

8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	120.00 Orang	5 Dokumen	319.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120.00 Orang	50.000.000,00
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	414.00 Orang	5 Dokumen	362.000.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	414.00 Orang	50.000.000,00

					Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60.00 Laporan	5 Dokumen	267.300.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60.00 Laporan	50.000.000,00
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum	Persentase Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	Jumlah Pelaksanaan	Kota Tanjung	100 %	4.00 Dokumen	5 Dokumen	3.500.000.000,00	Jumlah Dokumen	4.00 Dokumen	50.000.000,00

					Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kot a	Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Ko ta	Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			n			Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/K ota	
												Total Pagu	37.587.326.867,00		12.459.272.067,00	

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 memuat hasil yang ingin dicapai selama satu tahun yang tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kerjanya.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat sebagai tolak Pukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

SARAN

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke dalam suatu program kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana kerja ini dengan baik.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun merupakan gambaran satu tahun kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Perubahan Rencana ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan sehingga dapat berjalan optimal.

Tanjungpinang, Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang



SAMSUDI, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006